

**BAB III**  
**REALISASI PELEKSANAAN RKP TAHUN 2019**

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang dijabarkan dalam 8(delapan) Program dan 36 (tiga puluh enam) Kegiatan serta Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Berau Tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Program, Kegiatan dan Anggaran**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>4.677.942.000,-</b>	<b>3.041.340.274,-</b>	<b>65.01</b>
1.	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	245.000.000,-	244.938.426,-	99.97
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Fisik 2019)	979.252.000,-	922.789.100,-	94.23
3.	Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik - 2019)	3.098.690.000,-	1.535.351.388,-	49.55
4.	Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik	180.000.000,-	167.490.001,-	93.05
5.	Sosialisasi / Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi Klinik KB, dr.Praktek & Bidan Praktek	175.000.000,-	170.771.359,-	97.58
<b>2.</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>233.956.000,-</b>	<b>219.717.924,-</b>	<b>93.91</b>

	1.	Pembinaan PIK Remaja/Mahasiswa di Kabupaten Berau	233.956.000,-	219.717.924,-	93.91
<b>3.</b>	<b>Program Ketahanan dan Keluarga Sejahtera</b>		<b>317.233.000,-</b>	<b>287.469.393,-</b>	<b>90.62</b>
	1.	Pembinaan & Evaluasi Kelompok UPPKS	235.123.000,-	209.288.338,-	89.01
	2.	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok BKB-BKR dan BKL	82.110.000,-	78.181.055,-	95.22
<b>4.</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>		<b>1.835.555.000,-</b>	<b>1.689.381.468,-</b>	92,04
	1.	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)	775.770.000,-	719.656.870,-	92.77
	2.	Pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG	100.000.000,-	90.860.700,-	90.86
	3.	Kabupaten Layak Anak	400.000.000,-	354.504.295,-	88.63
	4.	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak	282.784.000,-	264.345.101,-	93.48
	5.	Pemenuhan Hak Anak	277.001.000,-	260.014.502,-	93.87
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan</b>		<b>566.502.000,-</b>	<b>523.718.300,-</b>	<b>92.45</b>
	1.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	416.200.000,-	381.120.300,-	91.57
	2.	Expose Peningkatan Kualitas Perempuan Dalam Pembangunan	100.302.000,-	96.238.000,-	95.95

3.	Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima	50.000.000,-	46.360.000,-	92.72
<b>Jumlah</b>		<b>9.500.031.500,-</b>	<b>7.567.427.590,-</b>	<b>79.66</b>

Sumber : Keuangan dan Aset DPPKBP3A Kab. Berau

## **B. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

### **a. Progran Keluarga Berencana**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Keluarga Berencana sebesar Rp. 4.677.942.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 3.041.340.274,- atau 65,01%, adapun rincian realisasi kegiatan adalah :

#### **1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin**

##### **Keluaran :**

Terlayannya Pasangan usia subur menjadi peserta KB

##### **Hasil :**

Prosentase Pemakaian Kontrasepsi KB (CPR)

#### **2. Penyediaan Saranan Prasarana Penyuluh KB (DAK-FISIK 2019)**

##### **Keluaran :**

Tersedianya Saprass Penyuluh KB

##### **Hasil :**

Peningkatan Pelayanan KB

#### **3. Bantuan Operasional KB ( DAK Non Fisik - 2019)**

##### **Keluaran :**

Terlayannya Masyarakat dalam hal ber KB

##### **Hasil :**

Peningkatan Jangkauan Pelayanan KB

#### **4. Pendampingan DAK BOKB dan DAK Fisik**

**Keluaran :**

Terdukungnya Kegiatan DAK BOKB dan DAK Fisik di kecamatan

**Hasil :**

Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

**5. Sosialisasi/Pelatihan Jaminan Pelayanan KB bagi klinik KB, dr,Praktek dan Bidan Praktek**

**Keluaran :**

Jumlah Petugas Klinik KB dan Faskes yang mengikuti sosialisasi / Pelatihan

**Hasil :**

Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

**b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja sebesar Rp. 233.956.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 219.717.924,- atau 93.91%, adapun rincian realisasi masing-masing kegiatan adalah :

**1. Pembinaan PIK Remaja / Mahasiswa di Kabupaten Berau**

**Keluaran :**

Terlaksananya Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi PIK Remaja Se Kabupaten Berau

**Hasil :**

Cakupan Pelayanan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja

**c. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp 317.233.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 287.469.393,- atau 90,62%, adapun rincian realisasi masing-masing kegiatan adalah :

**1. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS**

**Keluaran :**

Jumlah Kelompok UPPKS yang terbina dan terevaluasi

**Hasil :**

Persentase Keluarga Sejahtera

**2. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kelompok BKB-BKR-BKL**

**Keluaran :**

Jumlah BKB, BKR, BKLyang terbentuk, terbina dan terevaluasi

**Hasil :**

Persentase Keluarga Sejahtera

**d. Program Peningkatan Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak**

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak sebesar Rp. 1.835.555.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.689.381.468,- atau 92,04%, adapun rincian realisasi kegiatan adalah :

**1. Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)**

**Keluaran :**

Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Pusat Layanan Terpadu) 100%

**Hasil :**

Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan & Anak (Pusat Layanan Terpadu) 100%

**2. Pelatihan dan Road Show PUG Show PUG melalui PPRG**

**Keluaran :**

Jumlah OPD yang mengikuti Pelatihan, Bimtek PUG melalui PPRG 20 OPD

**Hasil :**

Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan & Anak (Pusat Layanan Terpadu) 100%

**3. Kabupaten Kota Layak Anak (KLA)**

**Keluaran :**

Jumlah score yang diperoleh KLA setiap tahunnya 100%

**Hasil :**

Persentase Lembaga Perlindungan Perempuan & Anak (Pusat Layanan Terpadu) 100%

**4. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak**

**Keluaran :**

Persentase Pelayanan konsultasi keluarga yang datang ke PUSPAGA 100%

**Hasil :**

Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Pusat Layanan Terpadu) 100%

**5. Pemenuhan Hak Anak**

**Keluaran :**

Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Forum Anak di Kecamatan.

13 Kecamatan/Kampung

**Hasil :**

Persentase Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan & Anak (Pusat Layanan Terpadu) 100%

**e. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**

**6. Pembinaan Organisasi Perempuan**

**Keluaran :**

Jumlah Organisasi Perempuan yang terbina dan terevaluasi.

23 Organisasi

**Hasil :**

Cakupan Organisasi yang aktif 100%

**7. Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam Pembangunan**

**Keluaran :**

Terlaksananya Expose peningkatan kualitas Perempuan dalam pembangunan dan Expose peningkatan kreatifitas ibu dalam pembangunan, 2 Kali

**Hasil :**

Cakupan Organisasi yang aktif 100%

**7. Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima**

**Keluaran :**

Terbina dan Evaluasi Desa Prima di Kecamatan.

6 Kelompok/Kecamatan

**Hasil :**

Cakupan Organisasi yang aktif 100%

**C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

**1. Permasalahan / Solusi**

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti dan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. hal ini terlihat dari realisasi fisik Kegiatan 96,22 % dan Realisasi keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 79,66%. Meskipun ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada program Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Berau dapat dijabarkan sebagai berikut :

**1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender**

**a. Pelatihan dan Road Show PUG melalui PPRG**

Permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Fungsi dari kelompok kerja (pokja) PUG yang belum optimal
2. Fungsi dari Driver PUG yang belum optimal
3. Pelatihan PUG melalui PPRG dilihat dari waktu pelaksanaan kurang maksimal pelaksanaan hanya 1 hari yang seharusnya pelatihan maksimal 2 hari
4. Peserta Pelatihan dari 20 OPD yang diundang dari masing-masing OPD 2 orang peserta yang diharapkan peserta adalah Kasubag penyusunan program dan Sekretaris namun yang hadir hanya Kasubag penyusunan program dikarenakan antusias dari OPD masih kurang dianggap kegiatan PUG tidak penting
5. Terbatasnya Nara Sumber dan kurangnya waktu sehingga tidak maksimal dalam pemberian contoh-contoh pembuatan GAP dan GBS
6. Road Show PUG melalui PPPr dengan melakukan kunjungan langsung ke 20 OPD waktu pelaksanaan cukup memadai namun tidak semua kabid atau kasi dapat mengikuti pertemuan di karenakan adanya kesibukan lain
7. Peserta Road Show diharapkan seluruh Eselon III dan IV padakenyataannya OPD juga belum respon positif atas kegiatan tersebut
8. Dilihat dari kunjungan ke 20 OPD dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada prakteknya sudah banyak OPD sudah mempunyai hasil kerja yang responsive gender namun hal tersebut belum tergambarkan di dalam perencanaan penganggarannya hal tersebut dapat dilihat dari Indikator Keluaran (Output) nya

Cara Pemecahan Masalah :

1. Kelompok kerja PUG yang telah di bentuk lebih optimalnya perlu adanya penjadwalan atau di agendakan pada tahun mendatang pertemuan

kelompok kerja setiap tiga bulan sekali untuk monitoring dan evaluasi atas PUG melalui PPRG disemuaOPD

2. Perlu dilakukannya Peningkatan SDA kepada Tim Driver dalam upaya pendampingan bagi OPD dalam peningkatan PUG melalui PPRG
3. Dalam membuat kegiatan diwajibkan semua OPD membuat kerangka acuan (KAK) / Tern of Reference (TOR) hal tersebut upaya membuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsi masing-masing OPD
4. Tahun 2020 akan diupayakan penganggaran kegiatan pelatihan peningkatan PUG dengan waktu pelatihan bagi OPD di maksimalkan 2 (dua) hari sehingga peserta pelatihan lebih maksimal dalam pemahaman PUG melalui PPRG
5. DPPKBP3A akan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan yang mengharapkan semua OPD di Kabupaten berau paham bahwa PUG melalui PPRP bukan saja menjadi tanggung jawab DPPKBP3A tetapi menjadi komitmen OPD untuk melaksanakan PUG melalui PPRG dengan menjalankan fungsi Fokal Point yang ada di OPD masing-masing
6. OPD setiap tahun dapat membuat GAP dan GBS dalam melaksanakan semua kegiatan yang ada di OPD dan akan dimonev oleh Tim Driver Kabupaten

## **2. Program Penguatan Kelembagaan PUG**

### **a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)**

Permasalahan Yang di hadapi :

1. Tidak semua masyarakat yang mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mau melaporkan ke P2TP2A, dikarenakan masyarakat masih beranggapan bahwa melaporkan kasus berarti membuka aib keluarga
2. Dalam melaksanakan kegiatan prenting Sex Education For Kids bagi orang tua murid SD kelas 4 s.d 6, tingkat kehadiran orang tua masih kurang, dikarenakan orang tua menganggap Sex Education hanya diberikan kepada orang dewasa
3. Beberapa PATBM yang dibentuk dalam melaksanakan fungsinya secara maksimal di karenakan keterbatasan anggaran

Cara Pemecahan Masalah :

1. Melakukan gerakan pencegahan kekerasan perempuan dan anak lewat aktivis PATBM yang sudah di bentuk di kelurahan dan kampong-kampung
2. Penambahan Tenaga konselor melalui APBD tahun 2020
3. Peningkatan Kapasitas SDM layanan, Aktivitas PATBM dan Tenaga Pendamping ABK melalui FPABK
4. Mengupayakan dan memperbanyak kegiatan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kampungsampai RT yang rawan terhadap kejahatan seksual anak

## **b. Kabupaten Layak Anak (KLA)**

Permasalahan yang di hadapi :

1. Perda yang ada belum mencakup 5 Klaster dari 24 Indikator KLA
2. Gugus Tugas KLA belum terkoordinasi dengan maksimal
3. RAD KLA belum terkoordinasi dengan maksimal
4. Profil anak belum sesuai dengan yang diinginkan
5. Kelana baru 1 dari 13 Kecamatan
6. Dekala baru 2 dari 109 Kelurahan/Kampung
7. PATBM ada 43 dari 109 Kelurahan/Kampung
8. Lembaga Masyarakat belum ada peningkatan dan belum terkoordinasi dengan baik
9. Dunia usaha tidak bisa mendapatkan datanya dengan baik terkait perannya dipemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
10. APSAI belum terbentuk
11. Mekanisme pengawasan internal di sarana-sarana public milik pemerintah belum terkoordinasi dengan baik
12. FA kabupaten 1, FA kecamatan 13, FA kelurahan/kampung 8 ,peran dan peningkatan kapasitas merekabelum maksimal
13. Lembaga pengasuhan keluarga dan anak (Puspaga,LK3.BKK.BKB) belum maksimal
14. Belum adanya Lembaga pengasuhan alternative yang berstandarisasi da pengawasan yang maksimal
15. Koordinasi tentang PAUD HI belum maksimal
16. Taman yang ada belum pernah di adakan audit
17. Zona KTR dan Pelaksanaan sangsinya belum maksimal

18. SRA baru 20 sekolah
19. Koordinasi dengan APH terkait ABH perlu ditingkatkan
20. Data Teknis

#### Cara Pemecahan Masalah / Solusi

1. Membuat Perda yang mencakup 5 Klaster dan 24 indikator KLA
2. Memaksimalkan koordinasi dengan gugus Tugas KLA ditahun 2020
3. Memaksimalkan RAD KLA
4. Perbaikan dalam pembuatan profil anak
5. Pembentukan kembali Kelana yang baru
6. Pembentukan Kembali Dekela yang baru
7. Memaksimalkan fungsi PATBM
8. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga masyarakat
9. Memaksimalkan permintaan data dari Dunia usaha terkait perannya dalam pemenuhan dan perlindungan khusus
10. Pembentukan APSAI
11. Meningkatkan koordinasi terkait mekanisme pengawasan internet disaranan public
12. Melaksanakan audit terhadap taman yang ada
13. Pelaksanaan sanksi dizona KTR
14. Pembentukan sekolah ramah anak
15. Memaksimalkan koordinasi dengan APH terkait ABH

**d. Expose Peningkatan Kreatifitas dan Kualitas Anak dalam Pembangunan**

Permasalahan yang di hadapi

1. Forum anak belum berfungsi sebagai pelapor dan pelopor.

Cara Pemecahan Masalah/Solusi

1. Perlu pelatihan pelopor dan pelapor untuk forum anak

**e. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak**

Permasalahan Yang di hadapi :

1. Masih minimnya pengetahuan masyarakat, orang tua tentang pola pengasuhan anak.
2. Tenaga konselor PUSPAGA juga merangkap sebagai tenaga di P2TP2A

Cara Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Pola Asuh Anak..
2. Perlu perekrutan tenaga penanganan kasus di P2TP2A dan mengembalikan fungsi konselor di PUSPAGA